

Intisari

Kabupaten Bangka sebagai entitas daerah di Indonesia, memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung pembiayaan layanan kepada masyarakat. Namun, dalam periode tahun 2019-2022 terlihat bahwa nilai realisasi PAD tidak mengalami peningkatan signifikan, hanya mencapai rata-rata 13% dari total Pendapatan Daerah. Kabupaten Bangka masih terkategori belum mandiri secara fiskal, dengan derajat desentralisasi fiskal berada pada rentang 10,01 - 20,00 persen. Meskipun BPK telah melakukan audit kinerja pengelolaan PAD dengan harapan dapat mendorong kemandirian fiskal daerah, namun peningkatan PAD Tahun 2022 belum juga signifikan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas hasil audit kinerja pengelolaan PAD dalam mendorong kemandirian fiskal di Kabupaten Bangka dan mengeksplorasi penyebab peningkatan PAD pada Pemerintah Kabupaten Bangka belum signifikan. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan partisipan yang memiliki kaitan dengan fenomena yang menjadi fokus penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian melalui audit kinerja pengelolaan PAD di Kabupaten Bangka oleh BPK belum efektif dalam mendorong kemandirian fiskal daerah. Selain itu, masih adanya asimetri informasi setelah pengendalian disebabkan adanya kendala dari prinsipal, agen, serta dari luar prinsipal dan agen. Dari perspektif prinsipal, ketidaktersediaan alat ukur yang pasti dan keterbatasan cakupan audit membatasi kemampuan BPK untuk mengidentifikasi akar penyebab secara menyeluruh. Kendala dalam menemukan akar permasalahan yang tepat juga menjadi hambatan dalam memberikan rekomendasi yang efektif. Di sisi agen, faktor-faktor agensi *risk aversion*, *self-interest*, dan *bounded rationality*, serta kendala regulasi, kelembagaan, dan tata kelola, juga turut berperan. Selain itu, pengaruh dari luar prinsipal dan agen seperti kurangnya kesadaran masyarakat, kenaikan transfer pusat, dan dampak pandemi Covid-19 semakin memperumit upaya meningkatkan PAD.

Kata kunci: Audit Kinerja, PAD, Kemandirian Fiskal, Asimetri, Pengendalian

Abstract

Regency Bangka, as a regional entity in Indonesia, has the responsibility to collect Regional Original Revenue (PAD) to support the financing of services to the community. However, in the 2019-2022 period, there was no significant increase in the value of realization of PAD, only reaching an average of 13% of total regional revenue. Bangka Regency is still categorized as not yet fiscally independent, with the degree of fiscal decentralization in the range of 10.01 - 20.00 percent. Although BPK has conducted a performance audit of the management of PAD with the hope of encouraging regional fiscal independence, the increase in PAD in 2022 was not significant.

This research aims to analyze the effectiveness of PAD management performance audit results in encouraging fiscal independence in Bangka Regency and explore the causes of the insignificant increase in PAD in the Bangka Regency Government. The method applied in this research was a qualitative method using a case study approach. The data collection was conducted through interviews with participants who were related to the phenomenon that was the focus of the research. The results showed that control through performance audits of PAD management in Bangka Regency by BPK has not been effective in encouraging regional fiscal independence. In addition, there was still information asymmetry after control due to constraints from the principal, agent, and from outside of the principal and agent. From the principal's perspective, the unavailability of definitive measurement tools and limited audit coverage limited BPK's ability to identify root causes thoroughly. Constraints in finding the right root cause also hindered effective recommendations. On the agent side, agency factors of risk aversion, self-interest, and bounded rationality, as well as regulatory, institutional, and governance constraints, also played a role. In addition, influences from outside the principal and agent such as lack of public awareness, increase in central transfers, and the impact of the Covid-19 pandemic further complicated the efforts to increase PAD.

Keywords: Performance Audit, PAD, Fiscal Independence, Asymmetry, Control